BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk danisi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.Tujuan dari reformasi akuntansi dan administrasi publik adalah akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah dalam membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tuntutan publik (masyarakat) akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya paradigma dan prinsip manajemen keuangan daerah yang baik terkait tanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada pengguna laporan keuangan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah adalahlaporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kualitatif seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi dalam

laporan keuangan pemerintah harus mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, artinya pemerintah daerah harus mampu mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai penelitian Erawati dan Abdulhadi (2018).

Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah/ pusat harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan (Kusuma, dkk., 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik maka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat diandalkan. Dengan terwujudnya laporan keuangan yang andal, maka informasi yang disajikan secara wajar bebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan menyesatkan, dapat diverifikasi, tidak berpihak, dan disajikan secara jujur (Dodopo, 2017). Informasi mungkin relevan, jika hakikat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut dapat menyesatkan. Laporan keuangan pemerintah sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada BPK meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Informasi yang terdapat dalam LKPD harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang berkualitas, dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Kusuma, dkk, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam LKPD untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah dan peran audit internal. Salah satunya adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu pemahaman seseorang staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun pelaporan akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur asset tetap / barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas (Erawati dan Abdulhadi, 2018).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang staf Organisasi Perengkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan yang didukung dengan pelatuhan, pengalaman dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan efektifiras dan efesiensi kinerja sehingga menghasilkan keluaran dan hasil (Erawati dan Abdulhadi, 2018). Apabila seorang staf Organisasi Perangkat

daerah tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai dibidang akuntansi, maka akan banyak hambatan yang akhirnya mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga kerja dan bahan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan pendaya gunaan teknologi informasi didalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya untuk pengambilan keputusan (Erawati dan Abdulhadi, 2018). Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini akanmemberikan kemudahan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi yang bermanfaat kepada publik.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip –prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2007:134). Dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu peran audit internal. Peran audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi dengan melakukan kegiatan audit, review, evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran perbaikan (Dodopo, 2017). Dengan adanya audit internal didalam Organisasi Perangkat Daerah dapat membantu mengevaluasi serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemantauan pengelolaan dalam mencapai tujuan organisasi.

Penyerapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kudus yang tergolong tidak stabil selama 5 (lima) tahun berturut-turut yang disebabkan karena faktor peraturan dari pusat, lemahnya sumber daya manusia (SDM)yang membuat rendahnya penyerapan APBD di Kabupaten Kudus. Adapun penyerapan APBD yang kurang optimal dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Penyerapan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Presentase %	Penyerapan (Rp)
1	2014	1,67 Triliun	48,53	813,848 Miliar
2	2015	2,13 Triliun	90	1,708 Triliun
3	2016	2,45 Triliun	47,84	1,174 Triliun
4	2017	2,09 Triliun	59,37	1,24 Triliun
5	2018	2,07 Triliun	48,23	1,001 Triliun

Sumber: jateng.antaranews.com tahun 2014-2018 yang dimodifikasi penulis 2019.

Penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir ini, mengalami defisit atau fruktuasi. Hal ini dibuktikan dengan melihat tabel diatas yang menunjukan bahwa dari total anggaran tahun 2014 pemerintah kudus mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1,67 triliun untuk pembiayaan di OPD, namun pemda kudus hanya mampu menyerap anggaran sebesar 48,53 % atau 813,848

miliar dari total anggaran murni APBD (jateng.antaranews.com). Penyerapan anggaran tahun 2014 tidak bisa terserap secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan proyek-proyek yang tidak terlaksana karena kapasitas sumber daya manusianya kurang merencanakan penyerapan anggaran. Banyak proyek glondongan atau belum jelas pengerjaanya sehingga membutuhkan banyakwaktu yang membuat rendahnya anggaran yang terserap pada tahun 2014.

Tahun 2015, APBDyang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp. 2,128 triliun. Dari anggaran murni tersebut pemda kudus mampu menyerap APBD sebesar 90 % atau Rp. 1,915 triliun, hal ini menunjukan adanya peningkatan dalam penyerapan APBD dari tahun 2014 (jateng.antaranews.com). Tingginya penyerapan anggaran tahun 2015 disebabkan karena kegiatan proyek hampir semua sudah selesai dikerjakan. Tahun 2016, terjadi peningkatan APBD sebesar Rp. 2,45 triliun, namun pemda kudus hanyamampu menyerap anggaran sebesar 47,84 % atau Rp. 1,174 triliun lebih rendah dari tahun sebelumnya (jateng.antaranews.com). Penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan karena sumber daya manusia belum mencairkan anggaran, melainkan menunggu akhir tahun anggaran setelah proyek selesai dikerjakan.

Tahun 2017, pemda kudus mendapatkan APBD sebesar Rp. 2,09 triliun yang terserap sebesar 59,37 % atau Rp. 1,24 triliun (jateng.antaranews.com). Penyebab rendahnya penyerapan anggara tahun 2017 ini, karena pihak rekanan (SDM) belum mengajukan pencairan anggaran kegiatan.Tahun 2018, total APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 2,07 triliun yang terserap sebesar 48,23 % atau Rp. 1,001 triliun. (Jateng.antaranews.com).

Penyerapan anggaran yang belum optimal di karenakan masih rendahnya perencanaan serta pengawasan terhadap anggaran sehingga memunculkan masalah pengelolaan anggaran serta kurang maksimalnya pelayanan bagi masyarakat. Apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai akan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk memaksimalkan penyerapan APBD pemerintah daerah harus mampu melakukan langkah-langkah stategis, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dimasing-masing OPD serta mencari solusi yang terbaik agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Penyerapan anggaran sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat, apabila memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai dimasing-masing OPD maka anggaran akan mampu terserap secara maksimal dan program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) menyatakan bahwa pemahaman SAKD dan kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas informasipelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Harnoni (2016) dengan menggunakan variabel kapasitas SDM dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan TI tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Fikri dkk (2016) berpendapat bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengandalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian yang dilakukan Putri (2017) dengan menggunakan variabel penerapan SIKD, penerapan SAP dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas informasipelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kintaatmaja (2015) berpendapat bahwa efektifitas pengendalian intern, pemahaman SAK dan kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas informasipelaporan keuangan pemerintah daerah.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2014) dengan variabel pengawasan internal, pemahaman SAK dan kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Mahaputra dan Putra (2014) menggunakan variabel kapasitas SDM, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi SAP memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) namun terdapat penambahan variabel independen, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah yang diteliti oleh Nugroho, (2018) mengemukakan bahwa standar akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan

keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah berperan penting didalam pemerintah, karena peran regulasi dari pemerintah pusat untuk menyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun penambahan variabel yang kedua yaitu, peran audit internal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dopodo, dkk (2017) menyatakan bahwa peran audit internal menjadi solusi untuk mengatasi asimetris (perbedaan) informasi laporan keuangan dengan mekanisme monitoring. Kemudian perbedaan yang terakhir berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian yang semulanya dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) melakukan penelitian pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini diubah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul **"Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk penelitian ini di batasi pada permasalahan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkanuraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pemenfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

   Diharapkan dapat memberikan tambahan wacana penelitian studi empiris dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bidang Teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna mengembangkan literatur ilmu akuntansi.

3. Bagi Manajemen

   Diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi manajemen dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan.

4. Bagi Pemerintah Daerah

   Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan kualitas informasi laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.